



<b>TAJUK</b>	<p><b>Percepat Desentralisasi Pengelolaan Sampah</b></p>	
	<p>Pemerintah memutuskan menutup tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan secara penuh pada Mei mendatang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY memperkirakan kapasitas TPST Piyungan Transisi Tahap II akan penuh pada April 2024. Pada Mei 2024, TPST Piyungan ditutup 100%. Dengan begitu, setiap kabupaten/kota didorong untuk mengelola sampah secara terdesentralisasi.</p> <p>Penutupan penuh TPST Piyungan tentu berdampak pada tiga wilayah yang saat ini masih membuang sampah ke TPST Piyungan, yakni Bantul, Sleman dan Kota Jogja.</p> <p>Faktanya hingga saat ini, meski TPST Piyungan masih dibuka terbatas, persoalan sampah nyatanya tak kunjung selesai.</p> <p>Tengok saja sepanjang Ring Road Selatan dan sejumlah titik seperti timur jembatan Gembira Loka Zoo. Gunung sampah sangat mudah ditemui. Para pembuang sampah di tempat pembuangan sampah yang semestinya sejak krisis sampah terjadi tahun lalu menyusul pembatasan TPST Piyungan.</p> <p>Saat ini pemerintah di tiga wilayah memang telah memulai kebijakan desentralisasi penanganan sampah. Dengan desentralisasi, pengelolaan sampah diserahkan ke masing-masing daerah. Selanjutnya, Pemkab mendirikan sejumlah tempat pengelolaan sampah di sejumlah titik di wilayahnya.</p> <p>Upaya desentralisasi penanganan sampah termasuk penggunaan teknologi</p> <p>pengolahan memang telah diupayakan, namun prosesnya tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, sebagian besar TPST masih dalam proses pembangunan alias belum semuanya siap. Proses pembangunan butuh anggaran dan kesiapan SDM pengelolanya, selain teknologi yang tepat. Di Bantul misalnya, keberadaan TPST seperti ITF Niten yang telah dibangun pun tetap butuh persiapan secara teknis. Di tempat lain, TPST yang telah beroperasi juga bukan tanpa masalah, seperti dampak lantaran sarana prasarana pengolahan sampah belum sepenuhnya memadai. Artinya, proses desentralisasi sampah ini butuh waktu, sementara Mei TPST Piyungan sudah ditutup.</p> <p>Jangan sampai pada Mei nanti, krisis sampah kembali memuncak di DIY seperti yang terjadi tahun lalu. Gunung sampah bertebaran di jalan-jalan, di kompleks perumahan dan sebagainya.</p> <p>Kondisi ini perlu jadi perhatian ekstra dan diprioritaskan penanganannya. Bila memang masalahnya anggaran, gelontoran segera walaupun mahal. Bila perlu refocusing anggaran, pangkas anggaran yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Beli peralatan yang mendukung pengolahan sampah sehingga risiko lingkungannya bisa ditekan.</p> <p>Pantau prosesnya secara berkala agar pekerjaan pembangunan TPST tidak molor. Perhatian besar juga perlu dicurahkan kepada Kota Jogja yang kesulitan mendapatkan</p> <p>lahan untuk lokasi TPST. Meski kabarnya ada lahan yang bisa disewa di Bantul, tetapi alternatif lahan lainnya tetap harus ada mengingat posisi Kota Jogja yang paling besar menjadi produsen sampah, karena kota ini sebagai basis tujuan wisatawan setiap libur panjang.</p> <p>Di sisi lain, Pemda DIY semestinya tidak lepas tangan begitu saja, meski regulasi menyatakan urusan sampah adalah persoalan pemerintah kabupaten/kota. Campur tangan Pemda DIY untuk membantu mempercepat desentralisasi sampah ini tetap penting perannya. Baik dukungan anggaran maupun bantuan pengadaan lahan untuk lokasi-lokasi TPST yang memungkinkan menggunakan tanah-tanah Sultan Grond, terutama untuk Kota Jogja.</p>	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005